

ANALISIS DESKRIPTIF BEBAN HUTANG LUAR NEGERI DAN PERTUMBUHAN EKSPOR NON MIGAS INDONESIA

SKRIPSI

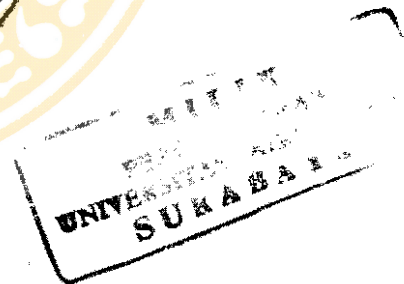
**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



Diajukan Oleh

**DIDIK SUPRIYADI
No. Pokok : 049816158**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**



SKRIPSI

ANALISIS DESKRIPTIF BEBAN HUTANG LUAR NEGERI DAN PERTUMBUHAN EKSPOR NON MIGAS INDONESIA PERSPEKTIF INVESTASI DOMESTIK DAN ASING

DIAJUKAN OLEH :

DIDIK SUPRIYADI

No. Pokok : 049816158

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Drs. Ec. SUPRAYITNO

TANGGAL 26-08-03

KETUA PROGRAM STUDI,


Dra. Ec. H. SRI KUSRENI, M.si

TANGGAL 26-08-103

Surabaya,.....27.....-03.....-03.....

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji



ABSTRAK

Ketidakmampuan Indonesia menciptakan kemandirian pembiayaan pembangunan mendorong digunakannya hutang luar negeri sebagai alternatif sumber pembiayaan. Pada dasarnya hutang luar negeri diperlukan untuk menutup gap tiga kesenjangan. Terus meningkatnya kesenjangan tabungan - investasi, defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran mendorong penggunaan hutang luar negeri. Pada awalnya hutang luar negeri memang berdampak positif terhadap investasi dan Produk Domestik Bruto. Namun akibat penggunaan hutang yang tidak terkontrol, dalam jangka panjang justru berakibat negatif. Pada awalnya kebijaksanaan penggunaan hutang luar negeri hanya untuk sektor publik. BUMN tercatat mulai berhutang sejak tahun 1975 atau enam tahun sejak pemerintah mulai berhutang sedangkan swasta tercatat mulai berhutang ke luar negeri tahun 1981. Dalam perkembangannya, hutang sektor swasta yang merupakan hutang berjangka pendek dengan tingkat bunga komersial terus menunjukkan peningkatan, bahkan pada tahun 1996 telah terjadi perubahan struktur hutang luar negeri Indonesia dimana dominasi hutang pemerintah dalam proporsinya terhadap total hutang telah digeser oleh hutang swasta yang mencapai US\$ 59.142 juta dengan pangsa pinjaman mencapai 51,67%, lebih besar dari hutang pemerintah sebesar US\$ 55.303 dengan pangsa pinjaman mencapai 48,32%. Kondisi ini terus bertahan hingga tahun 1998. Pada tahun 1999, hutang pemerintah kembali mendominasi total hutang nasional terkait dengan bantuan IMF lembaga-lembaga donor guna penyehatan kembali perekonomian yang terpuruk akibat krisis. Dari perhitungan indikator yang mengukur beban hutang luar negeri suatu negara terlihat bahwa Indonesia telah masuk ke dalam perangkap hutang luar negeri. Indikator DSR yang merupakan perbandingan nilai ekspor total dan pembayaran bunga dan cicilan hutang rata-rata $>30\%$, melebihi batas rasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yang berarti rata-rata lebih dari 30% hasil ekspor habis hanya untuk membayar bunga dan cicilan hutang, demikian juga rasio total hutang terhadap ekspor dan PDB yang juga selalu diatas batas rasional. Tingginya beban hutang luar negeri akan menurunkan kemampuan investasi domestik (pemerintah dan swasta) serta arus investasi asing. Dari sisi pemerintah hal ini dapat diamati dari perkembangan dana lokasi anggaran pada pengeluaran rutin dan pembangunan. Dari sisi pengeluaran rutin rata-rata $>30\%$ dari anggaran pengeluaran rutin dan 20% dari total APBN habis untuk membayar hutang, sedangkan pengeluaran pembangunan nilainya tidak pernah melebihi dana pengeluaran rutin bahkan dana pengeluaran pembangunan yang terbatas tersebut pada saat krisis digunakan untuk proyek-proyek sosial yang tidak mempunyai dampak pengganda besar dalam perekonomian. Dari sisi swasta penurunan investasi akibat permasalahan hutang luar negeri dapat diamati dari perkembangan tiga indikator yang sering digunakan BI untuk mengamati investasi swasta yaitu perkembangan kredit perbankan, impor bahan baku dan barang modal serta arus masuk investasi asing yang ketiganya menunjukkan penurunan. Akumulasi dari permasalahan hutang luar negeri yang berakibat pada penurunan investasi domestik dan asing bermakna akan menurunkan pertumbuhan ekspor non migas, hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya ekspor Indonesia sangat tergantung pada impor sehingga pada saat terjadi gangguan terhadap kemampuan pembiayaan impor akan berakibat pada turunnya ekspor.